

TUGAS AKHIR
SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KREDIT PADA PERUM
PEGADAIAN CABANG PANAM PEKANBARU

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh Gelar Ahli
Mada pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau



Oleh:

ZULPANI

NIM. 00972008245

JURUSAN MANAJEMEN PERUSAHAAN DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘Alamin.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan karunia-Nya telah memberikan keshatan rohani dan jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan peraktek kerja lapangan ini dengan judul “SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KREDIT PADA PERUM PEGADAIAN CABANG PANAM PEKANBARU” yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar AHLI MADYA pada jurusan Diploma III (Tiga) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahhumasholiallamuhammad waallamuhamad.

Dalam penulisan laporan ini penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan ini bayak sekali terdapat kekurangan. Untuk itu, penulis dengan senang hati menerima saran dan keritik dan dari pembaca yang sifat membangun. Penulisan laporan ini juga Tidak lepas dari bimbingan Bapak dan Ibu dosen, serta semua pihak yang ikut membantu penyusunan laporan ini. Dan tidak lupa pula penulis ucapkan rasa trima kasih kepada

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan peraktek kerja lapangan dengan baik.
2. Orang Tua yang selalu memberi dukungan dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan do’a dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
3. Ketua Jurusan Manajemen Perusahaan Diploma III (Tiga) Bapak Riki Hanri Malau, SE. MM, selaku program Diploma III (Tiga) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

4. Kepada Ibu Nurlasera SE.MSi, selaku pembimbing penulis.
5. Kepada Ibu Ratna Dewi, S.Sos, selaku sekretaris diploma III Manajemen Perusahaan.
6. Kepada Bapak dan Ibu dosen yang mengajar di fakultas ekonomi.
7. Buat orang-orang yang selalu ada untuk membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini. Terima kasih atas bantuan dan memberikan semangat kepada penulis.

Penulis merasa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam menyelesaikan laporan, penulis sangat menyadari bahwa laporan ini sangat jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik ALLAH SWT, Oleh karena itu apabila pembaca menemukan kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan laporan ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk hasil yang lebih baik dan bermanfaat bagi pembaca umumnya, dan bagi penulis khususnya.

Akhir kata penulis berharap laporan ini akan bermanfaat bagi semua, terutama bagi penulis dan fakultas ekonomi UIN SUSKA RIAU dan kepada hanya Alla SWT, kita menyerahkan segala usaha, semoga Dia selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua pencinta ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Amin.

Pekanbaru, 22 Mei 2012
Penulis

ZULPANI
NIM: 00972008245

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Pelaporan	4
1.4 Metode Pelaporan	4
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Sejarah Berdirinya Perum Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru..	7
2.2 Struktur Organisasi	9
2.3 Aktivitas Perusahaan	12
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
3.1. Tinjauan Teori	13
1. Pengertian Pegadaian	13
2. Sifat-sifat gadai	17
3. Objek Pegadaian	20
4. Terjdinya Pegadaian	21
5. Hak dan kewajiban pemegang gadai	26
6. Hak dan kewajiban pemberi gadai	30
7. Hapusnya gadai	31
8. Pengertian jaminan	33
9. Jenis-jenis jaminan	35
10. Tingkatan-tingkatan jaminan	40
11. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelunasan gadai di Perum Pegadaian	43
12. Dilihat dari segi islam	47

3.2. Tujuan Praktek	49
1. Prosedur pemberian kredit pada Perum Pegadaian cabang Panam Pekanbaru	49
2. Sistem pengambilan keputusan kredit pada Perum Pegadaian cabang Panam Pekanbaru	51

BAB VI PENUTUP

4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian fasilitas kredit yang selalu memberikan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. Dalam konteks inilah letak pentingnya lembaga jaminan itu.

Bentuk lembaga jaminan, sebagian besar mempunyai ciri-ciri internasional yang dikenal hampir disemua negara dan perundang-undangan modern, yaitu bersifat menunjang perkembangan ekonomi dan perkreditan serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal. Lembaga jaminan, tergolong bidang hukum yang bersifat netral, karena tidak mempunyai hubungan yang erat dan kehidupan spiritual dan budaya bangsa. Sehingga terhadap bidang hukum yang demikian, tidak ada keberatannya untuk diatur dengan segera. Karena jika dilihat, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan lembaga jaminan tersebut di Indonesia pada umumnya sudah usang. Sedikit sekali peraturan yang mengalami perubahan sejak pembentukannya sebagai mana dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan khusus lainnya, misalnya hipotik dan krediet verband. Gadai merupakan lembaga jaminan yang telah sangat dikenal dan dalam kehidupan masyarakat, dalam upayanya untuk mendapatkan dana guna berbagai kebutuhan. Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha

intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.NO.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya berdasarkan PP.NO.10./1990 (yang diperbaharui dengan PP.NO.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum. (Wikipedia Indonesia.com)

Dalam menjalankan usahanya, pegadaian menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam kredit untuk dunia usaha. Faktor yang harus diperhatikan oleh pihak bank dalam mengurangi timbulnya resiko kredit tidak dikembalikan sesuai dengan kesepakatan oleh debitur, maka jaminan kredit sangat dibutuhkan dalam arti kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang disepakati. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, Bank Indonesia selaku pengawas dan pengatur perbankan di Indonesia menetapkan ketentuan umum dalam pemberian kredit melalui analisis 5C, yaitu:

1. Penilaian terhadap *character* (watak)
2. *Capacity* (kemampuan)
3. *Capital* (modal)
4. *Colleteral* (angunan)
5. Dan *Condition* (kondisi ekonomi)

Untuk melihat perkembangan Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru dan antusiasme masyarakat disekitarnya untuk melakukan kredit pada Pegadaian di Cabang Panam Pekanbaru.

Tabel 1.1
Jumlah Kredit Yang Disalurkan
Preode 2011

NO	KETERANGAN	Tahun 2011 (Baki Debet) Rp	%
I	Kredit Kreasi		
	a. Lancar	Rp 76.763.000	66,75
	c. Kurang Lancar	—	—
	d. Diragukan	—	—
	e. Macet	Rp 38.237.000	33,25
	Sub Total	Rp 115.000.000	100

Sumber : Perum Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru

NPL 33,25

Berdasarkan tabel diatas kredit yang mengalami macet atau bermasalah hanya produk kredit kreasi sedangkan produk-produk kredit yang lain tidak mengalami macet atau bermasalah karena produk yang selain kreasi sangat ditekankan pada jaminan yang dijaminakan. Oleh karena itu produk yang lain tidak mengalami macet atau bermasalah.

Dari data diatas dapat dilihat adanya kecendrungan kredit yang bermasalah karena produk pegadaian cabang panam pekanbaru melalui proses pemberian kreditnya (membawa barang jaminan) sangatlah mudah dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang ada disekitarnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan laporan dengan judul “**Sistem Pengambilan Keputusan Kredit Pada Perum Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru** “.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan laporan ini adalah:

Bagaimanakah Sistem Pengambilan Keputusan Kredit Pada Perum Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru.

1.3. Tujuan dan Manfaat Pelaporan

1. Tujuan pelaporan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaporan ini adalah untuk mengetahui Sistem Pengambilan Keputusan Kredit Pada Perum Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Dalam Pelaksanaan Gadai di Perum Pegadaian

2. Mafaat Pelaporan

- a. Bagi penulis berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penerapan serta pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh dari bangku perkuliahan.
- b. Sebagai bahan informasi untuk melihat peranan pelaksanaan proses pegadaian cabang Panam Pekanbaru.
- c. Supaya bisa memberi manfaat dan pedoman bagi peneliti-peneliti mendatang yang ingin meneliti dalam masalah yang sama.

1.4. Metode Pelaporan

1. Lokasi dan Waktu Pelaporan

Laporan ini dilakukan pada Perum Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru. Waktu laporan dilakukan selama magang di instansi tersebut yaitu pada tanggal 1 Juli sampai 26 Agustus 2011.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Sumber data ini diperoleh dari wawancara langsung dan pencatatan transaksi pegadaian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh bahan-bahan laporan para berbagai sumber. Diantaranya data-data konsumen dan struktur organisasi.

3. Metode Pengumpulan Data.

Dalam melakukan pelaporan, penulis menggunakan dua metode mengumpul data yaitu:

- a. Wawancara : yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak terkait atau pejabat yang berwenang seperti menejer dan menejer operasional.
- b. Dokumentasi : dengan melihat data-data perusahaan.

4. Analisis Data.

Analisis data yang dilakukan dalam pelaporan ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan membahas data yang ada dianalisis dengan kegiatan-kegiatan yang ada dan kemudian diambil kesimpulan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam gambaran umum pembahasan dalam laporan maka dapat diuraikan atas VI Bab guna mempermudah penulisan mengenai hasil laporan dari laporan yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini Akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, metode laporan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, aktivitas Perum Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada Bab ini akan menguraikan tentang pengertian pegadaian, proses pinjaman pegadaian, unsur-unsur kredit pegadaian, pinjaman yang diberikan kepada masyarakat, produk yang dikembangkan kepada masyarakat, proses pelelangan dan modal kerja perum pegadaian dan menguraikan tentang pelaksanaan pegadian pada Perum Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Pegadaian

Usaha gadai di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Van Leening di zaman VOC yang bertugas memberikan pinjaman uang tunai kepada masyarakat dengan harta gerak. Dalam perkembangannya, sebagai bentuk usaha pegadaian banyak mengalami perubahan demikian pula dengan status pengelolaannya telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perubahan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Saat abad 1901 No.131 tanggal 12 maret 1901, maka pada tanggal 1 april 1901 berdirilah kantor pegadaian yang berarti menjadi Lembaga Resmi Pemerintah. Selanjutnya berdasarakan peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia tahun 1961 NO.178, berubah lagi menjadi Perusahaan Negara Pegadaian. Dalam perkembangannya, pada tahun 1969 yang mengatur bentuk-bentuk usaha menjadi tiga bentuk perusahaan yaitu Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan (PERSERON). Sejalan dengan ini, maka Perusahaan Negara Pegadaian berubah lagi statusnya menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian (PERUM Pegadaian No.7 tanggal 11 Maret 1969).

Sejak saat itu, kegiatan perusahaan terus berjalan dengan aset atau kekayaannya pun bertambah. Namun seiring dengan perkembangan zaman, Pegadaian dihadapkan pada kebutuhan untuk berubah pula, dalam arti untuk meningkatkan kinerjanya, tumbuh lebih besar lagi dan lebih fropesional dalam

memberikan keleluasan pengelolaan bagi manajemen dalam mengembangkan usanya, Pemerintah meningkatkan status Pegadaian dari Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) yang dituangkan dalam peraturan Pemerintah No.10 April 1990. Perubahan dari PREJAN ke PERUM ini merupakan tonggak penting dalam pengelolaan Pegadaian yang memungkinkan terciptanya pertumbuhan Pegadaian yang bukan saja makin meningkat kredit yang disalurkan, nasabah yang dilayani pendapatan dan laba perusahaan.

Visi dan Misi Perum Pegadaian

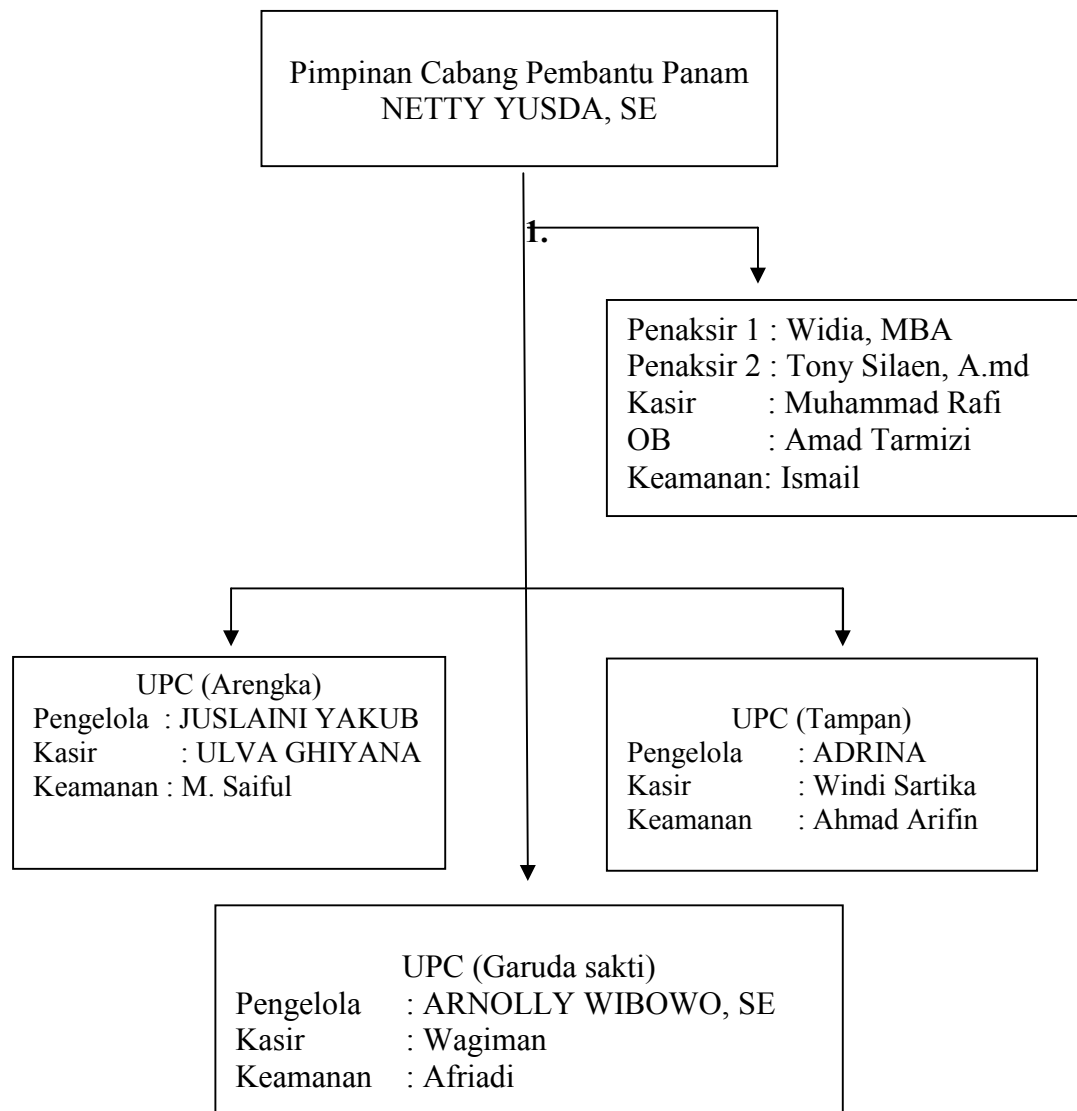
a. **Visi :**

Pada Tahun 2013 Pegadaian Menjai “Champion” Dalam Pembiayaan Mikro Dan Kecil Berbasis Gadai Dan Fiducia Bagi Masyarakat Menengah Ke Bawah.

b. **Misi :**

- 1) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fiducia.
- 2) Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
- 3) Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

2.2. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru



Sumber : Perum Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru.

Bagian Unit Kerja Perum Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru.

1. Pimpinan Cabang Pembantu Panam

Pimpinan cabang panam Pekanbaru mempunyai tugas menyusun perencanaan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas UPC cabang.

2. Bagian penaksir

Tugas pokok bagian penaksir adalah:

- a. Menaksir barang jaminan yang dibawa oleh calon debitur, apakah taksiran barang jaminan itu layak atau tidaknya dengan uang yang akan dikreditkan kepada debitur.
- b. Mengambil keputusan terhadap permohonan kredit yang diajukan dalam batas wewenangnya
- c. Mengawasi proses transaksi penyaluran dan pembayaran.
- d. Melaporkan perkembangan kredit kepada pimpinan cabang panam Pekanbaru.

3. UPC (Unit Pegadaian Cabang)

Bagian UPC ini memiliki tugas yaitu:

- a. Menaksir barang jaminan yang dibawa oleh calon debitur, apakah taksiran barang jaminan itu layak atau tidaknya dengan uang yang akan dikreditkan kepada debitur.
- b. Mengambil keputusan terhadap permohonan kredit yang diajukan dalam batas wewenangnya
- c. Mengawasi proses transaksi penyaluran dan pembayaran.
- d. Melaporkan perkembangan kredit kepada pimpinan cabang Pekanbaru

Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan struktur organisasi merupakan gambaran secara sekematis tentang hubungan kerja sama dari organisasi, Sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para pemimpin ke para bawahan.

Dari defenisi diatas dikemukakan para ahli manajemen maka penulis dapat mengambil beberapa unsur atau ciri-ciri dari organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya unsur manusia atau sekelompok orang.
- b. Adanya unsur sasaran atau tujuan.
- c. Adanya unsur tempat atau tempat kedudukan yang menduduki suatu jabatan atau pekerjaan agar terjadi kerja sama yang baik.
- d. Adanya sasaran teknologi atau penunjang pekerjaan.
- e. Adanya kerja sama yang didasari atas hak dan tanggung jawab masing-masing organisasi untuk mencapai tujuan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi sangat penting bagi perusahaan karena organisasi dapat memperjelas batas dari tugas, wewenang yang tanggung jawab sebagai anggota organisasi. Organisasi erat hubungannya dengan manajemen.

Organisasi merupakan alat bagi manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan orang yang akan melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut adalah menejer. Organisasi tanpa adanya manajemen mengakibatkan kekacauan dan sebaliknya manajemen tanpa

organisasi menyebabkan kebingungan, maka dari itu organisasi sangat diperlukan dalam suatu Perusahaan.

2.3 Aktivitas Perum Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru

Secara khusus kredit yang diterapkan pada Perum Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru terdiri dari empat macam yaitu:

a. Produk Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga)

Merupakan kredit untuk menambah Modal Usaha yang diberikan kepada pengusaha Mikro, (Pedagang kecil/ pedagang sayur/ kaki lima).

b. Produk LM (Logam Mulia)

Merupakan Produk untuk Berinvestasi yang nilainya *stabil, Likuid* dan aman secara *rill*

c. Produk Kreasi (Kredit Angsuran Sistim Fidusia)

Membantu mengembangkan Usaha Mikro dan menengah (UMKM) serta mengsejahterakan masyarakat, yang merupakan suatu misi yang di emban Pegadaian sebagai BUMN.

d. Kredit KCA (Kredit Aman Cepat)

Pinjaman berdasarkan Hukum Gadai dengan Prosedur Pelayanan yang mudah aman dan cepat. Dengan usaha ini Pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam per Bankan. Dengan demikian kalangan rakyat kecil tersebut terhindar dari peraktek pemberian pinjaman uang yang tidak wajar. Pemberian kredit jangka pendek dengan pemberian pinjaman mulai dari Rp 20.000 sampai dengan Rp 200.000.000 jaminan berupa benda bergerak/ berupa barang perhiasan emas dan berlian, Elektronik, kendaraan maupun alat rumah tangga lainnya,

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1. Tinjauan Teori

1. Pengertian Pegadaian

Gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* atau *vuistpand* (bahasa Belanda), atau *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris), *pfand* atau *faustpfand* (bahasa Jerman). Sedangkan dalam hukum adat istilah gadai ini disebut dengan cekelan.

Depdikbud (2002: 126), Pengertian pegadaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gadai berarti:

1. Suatu pinjam-meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai batas waktunya tidak ditebus, barang menjadi hak yang memberi pinjaman.
2. Barang yang diserahkan sebagai tanggungan hutang
3. Kredit jangka pendek dengan jaminan sekuritas yang berlaku tiga bulan dan setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan.

Depertemen Agama RI (2004: 10), Menerangkan tentang gadai sebagaimana dalam surat Al-Abaqarah ayat 238 sebagai berikut:

Artinya”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Gadai ini diatur dalam Buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUHPerdata.

Menurut Pasal 1150 KUHPerdata pengertian dari gadai adalah:

Suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu kepada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus dikeluarkan.

Menurut **Patrik dan Kashadi (2003: 13)** Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai;
2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur;
3. Barang yang menjadi objek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh;

4. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil dahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Membicarakan tentang pegadaian tidak jauh pula dengan kredit, jadi pegadaian sangat erat dengan kredit.

Pengertian kata Kredit jika kita lihat secara utuh mengandung beberapa makna, sehingga jika kita bicara tentang kredit tidak jauh juga kita membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. **(Kasmir.2008;98-99).**

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit (Bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa yang akan benar-benar diterima kembali dimasa akan datang. Sebelum dana dicairkan sudah benar-benar dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam terhadap calon debitur.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dilakukan pada saat perjanjian dimana masing-masing pihak mendatangi dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak bank dan nasabah.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan kepada calon debitur pasti memiliki jangka waktu tertentu dan masa pengembalian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak.

4. Resiko

Faktor resiko kerugian dalam kredit dapat diakibatkan dalam dua hal yaitu:

- a. Resiko kerugian yang diakibatkan nasabah yang sengaja atau lalai membayar kewajiban keditnya padahal mampu.
- b. Resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

Pada umumnya penilaian kredit dalam lembaga keuangan mempunyai 5C metode analisis

a. *Character*

Keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal dapat terjamin dari latar belakang dan pekerjaan maupun dari segi keperibadian.

b. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan berbisnisnya dihubungkan dengan latar pendidikannya. Memahami kemampuan berbisnis juga diukur dalam kemampuannya dalam memahami aturan pemerintah. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam melunasi kredit yang telah disalurkan.

c. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangannya (neraca dan laba rugi). *Capital* juga melihat dari mana saja sumber dana atau modal yang ada.

d. Colleteral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang disalurkan dan melihat keabsahan barang jaminan jika ada permasalahan maka barang jaminan dapat dipergunakan secepatnya.

e. Condition

Dalam menyalurkan kredit hendaknya melihat kondisi ekonomi dan politik. Disamping itu juga bagaimana prospek usahanya pada masa mendatang.

2. Sifat-sifat Gadai

1. Gadai adalah Hak Kebendaan

Dalam pasal 1150Perdata tidak disebutkan sifat ini, namun demikian sifat kebendaan ini dapat diketahui dari Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdata yang mengatakan bahwa : “Pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1977 ayat (2) KUHP perdata apabila barang gadai hilang atau dicuri.” Oleh karena hak gadai mengandung hak revindikasi, maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari hak kebendaan.

Menurut **Patrik dan kashadi (2005: 13-14)**, Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti eigendom, hak bezit, hak pakai dan sebagainya. Memang benda gadai harus diserahkan kepada kreditor tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya untuk mengambil, penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.

2. Hak Gadai bersifat *Accessoir*

Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya, yang berupa perjanjian pinjam uang. Sehingga boleh dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai piutang, dan tidak mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau *accessoir*, yang ada tidaknya tergantung dari ada dan tidak adanya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya.

Menurut **Patrik dan Kashadi (2005: 14)**, Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya dihapus. Beralihnya piutang serta beralihnya hak gadai, hak gadai berpindah kepada orang lain bersama-sama dengan piutang yang dijamin dengan hak gadai tersebut, sehingga hak gadai tidak mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri melainkan *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya.

1. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dibayarnya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap membebani benda gadai secara keseluruhan.

Dalam Pasal 1160 KUHP perdata disebutkan bahwa: "Tidak dapatnya hak gadai dan bagi-bagi dalam kreditor, atau debitur meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris." Ketentuan ini tidak merupakan ketentuan hukum yang memaksa, sehingga para pihak dapat menentukan sebaliknya atau dengan perkataan lain sifat tidak dapat dibagi-bagi dalam gadai ini dapat disimpangi apabila telah diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.

2. Hak gadai adalah hak yang didahulukan

Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1133 dan 1150 KUHP perdata. Karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan dari pada piutang-piutang lainnya, maka kreditor pemegang gadai mempunyai hak mendahulu (*droit de preference*).

- a. Benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh.
- b. Hak gadai adalah hak yang kuat dan mudah penyitaannya.

Menurut Pasal 1134 ayat (2) KUHPperdata dipertanyakan bahwa:

"Hak gadai dan *hipotik* lebih diutamakan dari pada *privilege*, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya".

Dari bunyi Pasal tersebut jelas bahwa hak gadai mempunyai kedudukan yang kuat. Disamping itu kreditor pemegang gadai adalah

termasuk pemegang separatis. Selaku separatis, pemegang gadai terpengaruh oleh adanya kavailitan debitur.

Menurut **Patrik dan Kashadi (2005: 15-16)**, Kemudian apabila debitor wanprestasi, pemegang gadai dapat dengan mudah menjual benda gadai tanpa memerlukan perantara hakim, asalkan penjualan benda gadai dilakukan di muka umum dengan lelang dan menurut kebiasaan setempat dan harus memberitahukan secara tertulis lebih dahulu akan maksud-maksud yang akan dilakukan oleh pemegang gadai apabila tidak ditebus (Pasal 1155 juncto 158 ayat (2) KUHP perdata). Jadi disini acara penyitaan lewat juru sita dengan ketentuan-ketentuan menurut Hukum Acara Perdata tidak berlaku bagi gadai.

3. Obyek Pegadaian

Obyek gadai adalah segala benda yang bergerak, baik yang bertubuh maupun yang tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 juncties 1153 ayat (1), 1152 bis, dan 1153 KUHP perdata. Namun benda bergerak yang tidak dapat dipindah tangankan tidak dapat digadaikan.

Dalam Pasal 1152 ayat (1) KUHP perdata disebutkan tentang hak gadai atas surat-surat bawa dan seterusnya, demikian juga dalam Pasal 1153 bis KUHP perdata dikatakan bahwa untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan *endosemen* dan penyerahan suratnya. Menurut **Patrik dan Kashadi (2005: 17)**, Penyabutan untuk surat-surat ini

dapat menimbulkan kesan dan keliru mengenai obyek gadai adalah piutang-piutang dibuktikan dengan surat-surat tersebut.

4. Terjadinya Pegadaian

Menurut **Muljadi dan wijaya, (2005: 74-75)**, Untuk terjadinya gadai harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jenis benda yang digadaikan. Adapun cara-cara terjadinya gadai adalah sebagai berikut:

1. Cara terjadinya gadai pada benda bergerak bertubuh

a. Perjanjian Gadai

Dalam hal ini antara debitur dengan kreditor mengadakan perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan hak gadai (perjanjian gadai).

Perjanjian ini bersifat konsensual dan obligatoir. Dalam Pasal 1151 KUHP perdata disebutkan bahwa: "Perjanjian gadai dapat dibuktikan dengan segala catatan yang diperoleh bagi pembuktian perjanjian pokok". Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai tidak terikat pada formalitas tertentu (bentuknya bebas), sehingga dapat dibuat secara tertulis maupun lisan.

b. Penyerahan benda gadai

Dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHP perdata disebutkan: "Tidak ada hak gadai atas benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitur atas kemauan kreditor." Dengan demikian

hak gadai terjadi dibawanya barang gadai keluar dari kekuasaan debitur pemberi gadai. Syarat bahwa barang gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan si pemberi gadai ini merupakan syarat *inbezitstelling* adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam gadai.

Barang dikatakan dibawa keluar dari kekuasaan pemberi gadai jika barang gadai diserahkan oleh pemberi gadai kepada kreditor atau pihak ketiga (sebagai pemegang gadai) yang disetujui oleh kreditor. Mengingat benda gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan pemberi gadai maka diperlukan suatu penyerahan. Penyerahan benda gadai dapat dilakukan secara nyata, simbolis, *traditio brevis manu* ataupun *traditio longa manu*. Penyerahan secara *constitutio possessorium* tidak menimbulkan hak gadai karena tidak memenuhi syarat *inbezitstelling*.

2. Cara terjadinya gadai pada piutang atas nama (*opnaam*)

a. Perjanjian Kredit

Debitur dengan kreditor membuat perjanjian gadai. Perjanjian ini bersifat *konsensual*, *obligator* dan bentuknya bebas.

b. Adanya pemberitahuan kepada debitur dari piutang yang digadaikan.

Pasal 1153 KUHP perdata menyebutkan bahwa: “Hak gadai piutang atas nama diadakan dengan memberitahukan akan penggadaian (perjanjian gadainya) kepada debitur. “ Dalam

memberitahukan ini debitur dapat meminta bukti tertulis perihal penggadaian dan persetujuan dari pemberi gadai. Setelah itu debitur hanya dapat membayar hutangnya kepada pemegang gadai. Bentuk pemberitahuan ini dapat dilakukan baik secara tertentu maupun secara lisan.

Patrik dan Kashadi (2003: 20-21), menjelaskan bahwa pemberitahuan dengan perantaraan jurusita perlu dilakukan apabila debitur tidak tersedia memberikan keterangan tertulis tentang persetujuan pemberi gadai itu. Dalam gadai piutang atas nama tersangkut tiga pihak seperti penyerahan piutang atas nama (*cessie*). Gadai piutang atas nama juga dinamakan *cessie*, karena disini yang di gadaikan adalah piutang atas nama, sedang penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan *cessei*.

3. Cara terjadinya gadai pada piutang atas bawa (atas tujuk atau *aantoonder*)

a. Perjanjian Gadai

Antara debitur dan kreditor dibuat perjanjian untuk memberikan hak gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual, *obligator* dan bentuknya bebas.

b. Penyerahan surat buktinya

Pasal 1152 ayat (1) KUHP perdata mengatakan bahwa : “ gadai surat atas bahwa terjadi, dengan menyerahkan surat itu ke dalam tangan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui

kedua belah pihak ”. perlu diketahui bahwa piutang atas bawa (atas tujuk) selalu ada surat buktinya, surat bukti ini mewakili piutang. Surat (piutang) atas bawa (atas tujuk) adalah surat tangan dibuat debitur, dimana diterangkan bahwa ia berhutang sejumlah uang tertentu kepada pemegang surat, surat mana diserahkannya kedalam tangan pemegang. Pemegang berhak menagih pembayaran dari debitur, dengan mengembalikan atas bawa itu kepada debitur. Contoh gadai surat/ piutang atas bawa (atas tujuk) misalnya sertifikat deposito. Menurut Bank Indonesia sertifikat deposito adalah bukti surat hutang yang dikeluarkan oleh bank atas sejumlah uang yang dipercayakan kepadanya atas untuk jangka waktu tertentu. Sertifikat deposito dikeluarkan atas bawa, dapat diperjual belikan sewaktu- waktu dan dijaminakan untuk suatu kredit dari Bank.

Bank Dagang Negara melakukan pengikatan gadai dengan menahan asli sertifikat deposito yang dijaminakan sampai fasilitas kreditnya lunas. Dalam hal ini tidak diperlukan surat kuasa, namun untuk membuktikan bahwa Bank menahan sertifikat deposito tersebut secara sah, maka nasabah harus menandatangani “ Surat Kuasa Pencairan Deposito” (**Badrulzaman : 97**)

Sedangkan contoh lain piutang atas bawa adalah obligasi, saham tidak atas nama.

4. Cara terjadinya gadai pada piutang atas bawa (atas tujuk atau *aantooder*)
 - a. Perjanjian Gadai

Antara debitur dan kreditor dibuat perjanjian untuk memberikan hak gadai. Perjanjian ini bersifat *konsensial*, *obligator* dan bentuknya bebas.

b. Penyerahan surat buktinya

Pasal 1152 ayat (1) KUHP perdata mengatakan bahwa:

“Gadai surat atas bawa terjadi, dengan menyerahkan surat itu ke dalam tangan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak.” Perlu diketahui bahwa piutang atas bawa (atas tunjuk) selalu ada surat buktinya, surat bukti ini mewakili piutang, Surat (piutang) atas bawa (atas tunjuk) adalah surat yang dibuat debitur, dimana diterangkan bahwa ia berhutang sejumlah uang kepada pemegang surat, surat mana yang diserahkan ke dalam tangan pemegang. Pemegang berhak menagih pembayaran dari debitur, dengan mengembalikan surat atas bawa itu kepada debitur. Contoh gadai surat/ piutang atas bawa (atas tunjuk) misalnya bersifat deposito.

Menurut Bank Indonesia sertifikat deposito adalah bukti surat hutang yang dikeluarkan oleh bank atas sejumlah uang yang dipercayakan kepadanya untuk jangka waktu tertentu. Sertifikat deposito dikeluarkan atas bawa, dapat diperjual belikan sewaktu-waktu dan dijamin untuk suatu kredit dari bank. Bank Dagang Negara melakukan pengikatan gadai dengan menahan asli sertifikat deposito yang dijamin sampai fasilitas kreditnya lunas. Dalam hal ini tidak diperlukan surat kuasa, namun untuk membuktikan

bahwa Bank menahan setifikat deposito yang timbul dari wesel itu, oleh pemegang wesel dapat diletakkan sebagai jaminan kredit kepada pemberi kredit.

5. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai

Selama berlangsungnya gadai, pemegang gadai mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik pada gadai benda bergerak bertubuh maupun pada gadai atas piutang (benda bergerak tidak bertubuh).

Hak-hak pemegang gadai adalah sebagai berikut: (Kitab Undang-undang hukum perdata)

1. Hak untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atau mengeksekusikan benda gadai (*parate executie*) Dalam Pasal 1155 KUH P perdata disebut bahwa: “Apabila oleh para pihak telah diperjanjikan lain, jika si berutang atau si pemberi gadai wanprestasi, maka si kredit berhak menjual barang gadai dengan maksud untuk mengambil pelunasan piutang pokok, bunga dan dari pendaptan penjualan tersebut.

2. Hak untuk menahan benda gadai (*hak retentie*)

Pasal 1159 ayat (1) KUHP perdata menyatakan : Dalam hal pemegang gadai tidak menyalahgunakan benda gadai, maka si berhutang tidak berkuasa untuk menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik hutang pokok, maupun bunga dan biaya hutangnya

yang untuk menjaminnya barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai.

Ketentuan ini memberi wewenang kepada pemegang gadai untuk menahan benda gadai selama debitor belum melunasi hutangnya.

3. Hak Konpensasi

Hak ini erat hubungannya dengan hutang kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1159 ayat (2) KUHP perdata apabila guna melunasi piutang pertama si kreditur telah mengeksekusikan benda gadai, maka dari hasil pendapatan lelang kreditor dapat mengambil lebih dahulu sejumlah uang yang sama banyaknya dengan piutang pertama yang dijamin dengan gadai. Jika ada sisa, maka diserahkan kepada debitor. Apabila sisa tersebut tidak diserahkan kepada debitor, maka kreditor berhutang kepada debitor. Dalam Pasal 1425 disebutkan bahwa : “Jika dua orang saling berhutang satu kepada yang lain, maka terjadilah diantara mereka suatu perjumpaan hutang, dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemegang gadai dapat mengkompensasikan piutangnya yang kedua dengan hutangnya (sisa penjualan lelang benda gadai) kepada debitor.

4. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan benda.

Pasal 1157 ayat (2) KUHP perdata menentukan bahwa yang harus diganti oleh debitor adalah biaya-biaya yang berguna dan perlu

yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai. Selain biaya-biaya itu belum dibayar, maka si kreditor tidak diwajibkan untuk mengembalikan barang gadai kepada debitur.

5. Hak untuk menjual dalam kepailitan debitur.

Jika debitur pailit, maka kreditor pemegang gadai dapat melaksanakan hak-haknya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan demikian hak kreditor untuk melakukan *parate* eksekusi berkurang dengan terjadinya kepailitan debitur. Hak untuk menjual barang gadai harus dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah debitur dinyatakan pailit, kecuali jika tenggang waktu tersebut diperpanjang oleh hakim.

6. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai.

Pemegang gadai dapat menuntut agar benda gadai akan tetap pada pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonnis hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya (Pasal 1156 ayat (1) KUHP perdata). Hal ini berarti bahwa barang gadai dibeli oleh kreditor dengan harga pantas menuntut pendapat hakim.

7. Hak Preferensi

Kreditor pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya daripada kreditor-kreditor lain.

8. Hak untuk menjual benda gadai dengan perantaraan hakim

Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan piutang dapat juga terjadi jika si berpiutang menuntut dimuka hakim supaya

barang-barang gadai dijual menurut cara-cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang pokok beserta bunga dan biaya. Hal ini biasanya terjadi jika benda gadai berupa benda antik.

9. Hak untuk menerima bunga piutang gadai.

Hak ini berdasarkan Pasal 1158 KUHP perdata yang menentukan bahwa: “Pemegang gadai dari suatu piutang yang menghasilkan bunga, berhak menerima bunga itu, dengan kewajiban memperhitungkan dengan bunga piutang yang harus dibayarkan kepadanya.”

10. Hak untuk menagih piutang gadai.

Hak ini dilakukan dengan cara pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dari pemberi gadai kepada pemegang gadai untuk menagih dan menerima pembayaran dari debitur yang hutang-hutangnya digadaikan. Pemberian kuasa ini dicantumkan dalam perjanjian gadai. Adapun kewajiban-kewajiban dari pemegang gadai adalah sebagai berikut:

a) Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual.

Pemberitahuan dengan telegraf atau surat tercatat berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat (3) KUHP perdata)

b) Kewajiban memelihara benda gadai.

Kewajiban memelihara benda gadai ini dapat ditimbulkan dari bunyi Pasal 1157 ayat (1) dan Pasal 1159 ayat (1) KUHP perdata. Dalam Pasal 1157 ayat (1) KUHP perdata ditentukan

bahwa:”Pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya.” Begitu juga pemegang gadai tidak boleh menyalahgunakan benda gadai (Pasal 1159 ayat(1) KUHP perdata).

c) Kewajiban untuk memberikan perhitungan antara hasil penjualan barang gadai dengan besarnya piutang kepada pemberi gadai.

d) Kewajiban untuk mengembalikan barang gadai.

Kewajiban ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 1159 ayat (1) KUHP perdata,yaitu:

1) Kreditor telah menyalahgunakan barang gadai;

2) Debitur telah melunasi sepenuhnya, baik utang pokok, bunga dan biaya hutangnya serta biaya untuk menyelamatkan barang gadai.

e) Kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutang kepada debitur.

f) Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai pemberi gadai.

6. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Menurut **Patrk dan Ksahadi, (2003: 29)**, Hak-hak pemberi gadai:

1. Hak untuk menerima sisa hasil pendapatan penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok, bunga dan biaya dari pemegang gadai.

2. Hak untuk menerima penggantian benda gadai apabila benda gadai telah hilang dari kekuasaan si pemegang gadai.

Kewajiban-kewajiban pemberi gadai:

1. Demi keselamatan benda gadai dari bencana alam/force majeure didalam praktek sering pemberi gadai diwajibkan untuk mengasuransikan benda gadai. Kewajiban ini memang *efisien* untuk kredit dalam besar.
2. Apabila yang digadai adalah piutang, maka selama piutang itu digadaikan pemberi gadai tidak boleh melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari debiturnya (debitur piutang gadai). Jika debitor piutang gadai telah membayar hutangnya kepada pemberi gadai, maka pembayar itu tidak sah kewajibannya untuk membayar kepada pemegang gadai tetap meningkat.

7. Hapusnya Gadai

Menurut **J. Satrio (2002: 132)**, Hak Gadai menjadi hapus karena beberapa alasan:

1. Karena hapusnya perikatan pokok

Hak gadai adalah hak *accessoir*, maka dengan hapusnya perikatan pokok membawa serta hapusnya hak gadai.

2. Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai

Pasal 1152 ayat (3) KUHP perdata mentukan bahwa:”Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kebiasaan si pemegang gadai “ Namun demikian hak gadai tidak menjadi hapus apabila

pemegang gadai kehilangan kekuasaan atas barang gadai dengan tidak suka rela (karena hilang atau dicuri). Dalam hal ini jika ia memperoleh kembali barang gadai tersebut, maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

3. Karena musnahnya benda gadai

Tidak ada obyek gadai mengakibatkan tidak adanya hak kebendaan yang semula membebani benda gadai, yaitu hak gadai.

4. Karena penyalahgunaan benda gadai

Pasal 1159 ayat (1) KUHP perdata menyebutkan bahwa: “Apabila kreditor menyalahgunakan benda gadai, pemberi gadai berhak menuntut pengembalian.” Dengan dituntutnya kembali benda gadai oleh pemberi gadai maka hak gadai yang dimiliki pemegang gadai menjadi dihapus, apabila pemegang gadai menyalahgunakan benda gadai.

5. Karena pelaksanaan benda gadai

Dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap benda gadai, maka benda gadai berpindah kepada orang lain. Oleh karena itu maka hak gadai menjadi hapus.

6. Karena pelaksanaan benda gadi

Pasal 1152 ayat (2) KUHP perdata menyebutkan bahwa.”Tak ada hak gadai apabila barang gadai kembali dalam kekuasaan pemberi gadai.”

7. Karena percampuran

Percampuran terjadi apabila piutang yang dijamin dengan hak gadai dan benda gadai berada dalam tangan atau orang. Dalam hal ini terjadi percampuran, maka hak gadai menjadi hapus. Orang tidak mungkin mempunyai hak gadai atas benda miliknya kembali.

8. Pengertian Jaminan

Menurut **Oey Hoey (2000: 14)**, Istilah kata jaminan berasal dari kata 'jamin' yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggung.

Dalam hal ini dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang ditentukan pada Pasal 1131 KUHP perdata maupun tanggungan atas petikatan tertentu dari seseorang seperti diatur dalam Pasal 1139-1149 KUHP perdata tentang piutang yang diistimewakan, Pasal 1150-1160 KUHP perdata tentang gadai, Pasal 1162-1178 tentang hipotek.

Pasal 1820-1850 tentang penanggungan utang jaminan sendiri lazimnya dikotruksikan sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*). Menurut Sofwan (1980: 37) Sebagai perjanjian *accessoir*, perjanjian memperoleh akibat-akibat hukum antara lain:

1. Adanya tergantung pada perjanjian pokok
2. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok
3. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian penanggungan ikut batal

4. Jika perjanjian pokok hapus, maka perjanjian penanggungan ikut hapus
5. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok

Menurut **Sjahdeini (2002: 281-282)**, dalam jaminan terkandung beberapa asas, yaitu, hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap para kreditor lainnya;

1. Hak jaminan merupakan hak aksesoir terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu ialah perjanjian utang-piutang antara kreditor dan debitur;
2. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditor pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.
3. Hak jaminan merupakan hak kebendaan. Artinya hak jaminan itu akan selalu melekat diatas benda tersebut kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya.
4. Kreditor pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya kreditor pemegang hak jaminan itu berwenang menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi tagihannya kepada debitur.

5. Karena hak jaminan merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga. Oleh karena hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, maka terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas, yang artinya hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan. Sebelum didaftarkan hak jaminan itu bukan berlaku bagi pihak ketiga. Asas publisitas tersebut dikecualikan bagi hak jaminan gadai.

Hal tersebut dapat dimengerti karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bagi sahnya hak jaminan gadai benda yang dibebani dengan hak jaminan gadai itu harus diserahkan kepada kreditor pemegang hak jaminan gadai tersebut, dan hak jaminan gadai menjadi batal apabila benda yang dibebani dengan hak jaminan gadai itu terlepas dari penguasaan kreditor pemegang hak jaminan gadai tersebut;
- b. Benda yang dapat dibebani hak jaminan gadai hanya terbatas pada benda bergerak;
- c. Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun tagihan yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasai benda bergerak tersebut dianggap sebagai pemiliknya.

9. Jenis-jenis Jaminan

Muljadi dan Widjaja (2005: 64), Berpendapat bahwa umumnya jenis-jenis jaminan sebagaimana dikenal Tata Hukum Indonesia dapat

digolong-golongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya , menurut objeknya, menurut cara kewenangan cara menguasainya, sebagai berikut:

1. Cara terjadinya

- a. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian. Jaminan yang ditentukan oleh undang-undang ialah jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak, misalnya adanya ketentuan undang-undang yang menentukan bahwa semua harta benda debitor baik benda bergerak maupun benda tetap, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan bagi seluruhnya perutangan, pembagian hasil penjualan dari benda-benda jaminan yang harus propesional diantara para kreditor, jaminan-jaminan yang pemenuhan piutangnya didahulukan ialah pemegang hak privelege, pemegang gadai dan pemegang hipotik.
- b. Sementara hak jaminan yang timbul karena diperjanjikan terlebih dahulu diantaranya adalah: Hipotik, Gadai, Credietverbanad, Fiducia, Penanggungan (borgtocht), perjanjian gransi, perutangan tanggung menanggung.

2. Menurut **Sofwan (2000: 45-46)**,Sifatnya adalah:

- a. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus jaminan yang diberikan kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta kekayaan debitor dan sebagainya disebut

jamina umum. Artinya benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukkan untuk seorang kreditor, sedangkan hasil penjualan benda jaminan itu dibagi-bagi diantara para kreditor seimbang dengan piutangnya masing-masing. Terhadap jaminan yang bersifat umum ini, walaupun telah ada ketentuan dalam undang-undang yang bersifat memberikan jaminan bagi perutangan debitor sebagaimana tercantum dalam Pasal 1131, Pasal 1132 KUHPdata.

- b. Dalam praktek seringkali para kreditor kurang merasa aman, karena itu para kreditor memerlukan jaminan yang dikhususkan baginya. Timbulnya jaminan khusus ini sendiri karena adanya perjanjian antara kreditor dan debitur baik bersifat perorangan ataupun kebendaan.
- c. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Tergolong jaminan yang bersifat kebendaan adalah: hipotik, gadai, fiducia.

Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialah: borgtocht (perjanjian penanggungan), perjanjian garansi. Hak kebendaan memberikan keleluasan yang langsung terhadap bendanya, sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan dengan yang lain. Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan adalah memberikan hak verbal kepada si kreditor terhadap hasil penjualan

benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya, yang mempunyai ciri-ciri:

- a) Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur
- b) Dapat dipertahakan terhadap siapapun
- c) Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*), dan
- d) Dapat diperalihkan
- e) Sedangkan jaminan yng bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, terhadap kekayaan seumumnya.

3. Obyeknya

Jaminan atas obyek benda bergerak dan jaminan benda tak bergerak. Dalam Hukum Perdata pembedaan atas benda bergerak dan tidak bergerak mempunyai arti yang begitu penting yaitu mengenai:

a. Cara pembebanan

Dalam hal pembedaan, untuk benda-benda bergerak dilakukan dengan gadai dan fiducia, sementara untuk benda yang tidak bergerak dilakukan dengan jaminan hipotik dan *credietverbad*.

b. Cara penyerahan

Cara penyerahan benda bergerak menurut jenisnya dilakukan dengan penyerahan nyata, penyerahan simbolis (penyerahan kunci gudang), *tradition brevimanu*, *consitutum possessorium*, *cessie* dan *endosemen*. Sedangkan untuk benda

bergerak penyerahan dilakukan dengan balik nama, yaitu melakukan penyerahan juridiks yang bermaksud mengalihkan hak itu, dibuat dengan bentuk akta otentik yang kemudain didaftarkan.

c. Dalam hal daluwarsa

Untuk benda tidak mengenal daluwarsa, sedangkan untuk tak beregrak mengenal daluwarsa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1946 KUHPerdara sampai Pasal 1993 KUHPerdara.

d. Dalam hal bezit

Dalam hal kedudukan berkuasa (*bezit*), untuk benda bergerak berlaku azas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1977 KUHPerdara, bahwa bezit atas benda bergerak berlaku sebagai alat sempurna, sedangkan untuk benda tak tetap tidak berlaku azas yang demikian.

4. Kewenangan menguasai benda Jaminan

Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya Jaminan yang diberikan mnguasai bendanya misalnya gadai (*pand*, *pledge*) dan hak retense. Sedangkan jaminan yang diberikan dengan tanpa menguasai bendanya dijumpa pada hipotik (*mortgage*), ikatan kredit(*credietverband*), fiducia, dan frivillegi. Jaminan dengan menguasai bendanya memberikan hak preferensi dan hak yang senantiasa mengikuti bendanya.

10. Tingkatan-Tingkatan Jaminan

a. Azas Persamaan Para Kreditor

Dalam ketentuan undang-undang kreditor memiliki hak penuntutan pemenuhan utang terhadap seluruh harta kekayaan debitor baik yang berwujud benda yang bergerak maupun benda tak bergerak, baik yang telah ada maupun yang belum ada. Yang mana dari hasil penjualan benda-benda tersebut kemudian dibagikan kepada kreditornya secara seimbang sesuai piutang masing-masing (*ponds-ponds gelijk*).

Hak pemenuhan piutang para kreditor tersebut adalah sama dan sederajat satu dengan yang lainnya, tidak ada yang lebih diutamakan. Seluruh harta kekayaan tersebut berlaku sebagai jaminan bagi seluruh perutangan kreditor tersebut merupakan jaminan umum. Jaminan umum tidak perlu diperjanjikan terlebih dahulu karena hak ini timbul secara otomatis diberikan undang-undang. Sementara kreditor-kreditor jenis ini disebut kreditor konkruen.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam hal-hal tertentu azas persamaan hak menurut keseimbangan piutang dari kreditor bersama ini dapat tertanggung, yaitu dengan adanya para kreditor yang mempunyai hak preferensi diantara kreditor konkruen.

b. Hak Preferensi Kreditor

Dalam pemenuhan perutangan, eksekusi dan kepailitan tingkatan-tingkatan para kreditor tidaklah sama. Menurut ketentuan

Pasal 1133 KUHPerdato ditentukan bahwa para kreditor pemegang hioti gadai, pemegang hak istimewa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari piutang-piutang lainnya. Kreditor pemegang hak-hak sebagaimana yang ditentukan dalam pasal ini disebut dengan kreditor preferen dan mempunyai hak preferensi.

Pasal 1134 KUHPerdato menjelaskan yang dimaksud hak istimewa adalah sutau yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatan kreditor tersebut lebih tinggi dari pada kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat tagihan kreditor tersebut. (Kitabv Undang-Undang Hukum Perdata).

Gadai dan hipotek disebut hak jaminan. Setelah berlakunya undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan Fiducia, maka selain gadai dan hipotik, juga hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan jaminan fiducia merupakan hak jaminan. Setelah berlakunya Undang-Undang Hak tanggungan, hipotek atas tanah dan bendan-benda yang breada diatas tanah tidak lagi berlaku. Hipotik hanya berlaku terhadap kapal laut yang berukuran paling sedikit 20 m, isi kotor dan bagi pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia.

Kedudukan hak jaminan terhadap hak istimewa, menurut Pasal 1134 ayat (2) KUHPdata mentukan bahwa hak jaminan lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali jika undang-undang menentukan lain. Hak untuk didahulukan dalam pemenuhan ini timbul karena: pertama sengaja diperjanjikan, kedua karena undang-undang.

Menurut **Sofwan**, alasan dibalik ketentuan mengapa kedudukan hak jaminan adalah lebih tinggi dari hak istimewa adalah karena pada azasnya kehendak dari para pihak adalah lebih diutamakan dari ketentuan undang-undang. (Sofwan, 1980: 77).

Namun demikian, dalam Pasal 1139 ayat (1) dan Pasal 1149 (1) KUHPdata disebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu adakalanya hak istimewa mempunyai kedudukan lebih tinggi dari hipotik dan gadai(hak jaminan). Juga dalam lapangan Hukum Dagang Pasal 318 KUH Dagang diatur bahwa hak privilege (hak istimewa) lebih diutamakan dari hipotik atas kapal.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa terdapat tiga jenis kreditor, yaitu:

- 1) Kreditor preference, yaitu kreditor pemegang hak tanggungan dan hak gadai yang dapat bertidak sendiri. Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan seolah-olah tidak ada kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedangkan bila ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai model pailit. Sebaliknya, bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditor untuk

tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditor bersaing (cocurrent).

- 2) Kreditor pemegang hak istimewa yang oleh undang-undang dalam keadaan tertentu memiliki kedudukan didahulukan dari para kreditor konkuren maupun kreditor preferen.
- 3) Kreditor bersaing (concurrent), dimana pelunasan tagihan-tagihan mereka diambilkan dari harta pailit setelah dikurangi dengan pelunasan untuk kreditor khusus, dan kreditor istimewa, dibagi menurut pertimbangan besar kecilnya piutang mereka.

11. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pelunasan Gadai Di Perum Pegadaian

Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat empat syarat untuk menentukan sahnyanya perjanjian, yaitu : (Kitap UndangUndang Hukum Perdata)

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang diinginkan pihak lawannya. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah ada, mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Untuk mengetahui kapan terjadinya kata sepakat, KUHPerdara sendiri tidak mengaturnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori yang mencoba memberikan penyelesaian persoalan sebagai berikut:

1) Teori kehendak (*Wistheorie*)

Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi manakala para pihak menyatakan kehendaknya untuk mengatakan suatu perjanjian.

2) Teori kepercayaan (*Vetrouwestheorie*)

Berdasarkan teori kepercayaan, kata sepakat dalam perjanjian dianggap telah terjadi pada saat pernyataan salah satu pihak dapat dipercaya secara obyektif oleh pihak yang lainnya.

3) Teori ucapan (*Uitingstherie*)

Dalam teori ini yang dilihat adalah ucapan (jawaban) debitur. Kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengucapkan persetujuannya terhadap penawaran yang dilakukan kreditur. Jika dilakukan dengan surat, maka kata sepakat terjadi pada saat menulis surat jawabannya.

4) Teori pengiriman (*Verzenuingstheorie*)

Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengirimkan jawaban kepada kreditur. Jika pengiriman dilakukan lewat pos, maka kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat surat jawaban tersebut distempel oleh kantor pos.

5) Teori penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditur menerima kemudian membaca surat jawaban dari debitur, karena saat itu dia mengetahui kehendak dari debitur.

6) Teori pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Menurut **R.Subekti (2001: 25-26)**, teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengetahui bahwa telah menyatakan menerima tawarannya. Setelah mengetahui waktu terjadinya kata sepakat, maka sebagaimana telah diketahui dengan kata sepakat berakibat perjanjian itu mengikat dan dapat dilaksanakan. Namun demikian untuk sahnya kata sepakat harus dilihat dari proses terbentuknya kehendak yang dimaksud.

Meunurut **R.Subekti(2001: 29)**,meskipun demikian kebanyakan para serjana berpendapat bahwa sepanjang tidak ada dugaan pernyataan itu keliru, melainkan sepantasnya dapat dianggap melahirkan keinginan orang yang mengeluarkan pernyataan itu, maka *vertrouwestheorie* yang dipakai.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap merupakan surat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum seacara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu.

c. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1332 BW ditentukan barang-barang yang bisa dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Lazimnya barang-barang yang

diperdagangkan untuk kepentingan umum, dianggap sebagai barang-barang diluar perdagangan, sehingga tidak dapat dijadikan obyek perjanjian.

Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut diatas menunjukkan, bahwa dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, supaya perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat yang ketiga ini berakibat batal demi hukum, perjanjiannya dianggap tidak pernah ada (terjadi). (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal, merupakan syarat yang keempat atau terakhir untuk sahnya perjanjian. Melihat ketentuan dalam Pasal 1335 KUHP perdata menyatakan, bahwa suatu perjanjian tanpa sebab yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Perjanjian tanpa sebab, apabila perjanjian itu dibuat dengan tujuan yang tidak pasti atau kabur. Perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu, tujuannya untuk menutupi apa yang sebenarnya hendak dicapai dalam perjanjian tersebut. Suatu sebab dikatakan terlarang, apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertibam umum dan kepentingan umum (Pasal 1337 KUHP perdata). (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

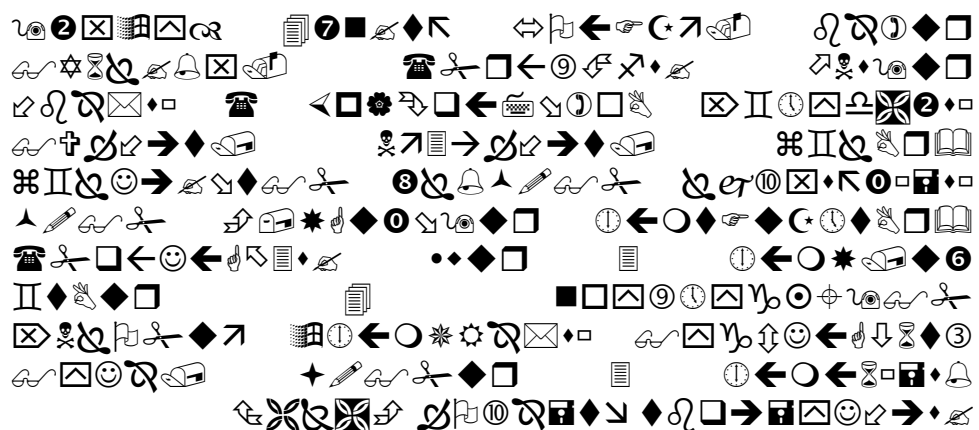
12. Dilihat dari segi islam

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang

mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan dijelaskan lagi dalam Al-Quran QS.Al- Babaqarah ayat 283

sebagai berikut:



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjaka” (Al-Baqarah 283)

3.2. Tinjauan Praktek

1. Prosedur pemberian kredit pada Perum Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru

Didalam pemberian kredit pada Perum Pegadaian cabang Panam Pekanbaru ada beberapa persyaratan yang harus disediakan yaitu:

- a. Barang yang digadaikan/Jaminan
- b. Surat-surat bersangkutan dengan barang gadaian.
- c. Photo cofy KTP
- d. Kuitansi pembelian/matrai

Kredit yang dapat disalurkan dalam Perum Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru merupakan kegiatan sehari-hari yang di kerjakan oleh pegawai Perum Pegadaian Cabang Panam yang merupakan proses pemasaran produk dan jasa yang bermanfaat untuk segala kalangan masyarakat, produk-produk pegadaian meliputi :

- e. Produk Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga)

Merupakan kredit untuk menambah modal Usaha yang diberikan kepada pengusaha Mikro, (Pedagang kecil/ pedagang sayur/ kaki lima).

- f. Produk LM (Logam Mulia)

Merupakan Produk untuk Berinvestasi yang nilainya *stabil*,
Likuid dan aman secara *rill*

- g. Produk Kreasi (Kredit Angsuran Sistim Fidusia)

Membantu mengembangkan Usaha mikro dan menengah (UMKM) serta mensejahterakan masyarakat, yang merupakan suatu misi yang di emban Pegadaian sebagai BUMN.

h. Kredit KCA (Kredit Aman Cepat)

Pinjaman berdasarkan Hukum Gadai dengan Prosedur Pelayanan yang mudah aman dan ceapt. Dengan usaha ini Pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam per Bankan. Dengan demikian kalangan rakyat kecil tersebut terhindar dari peraktek pemberian pinjaman uang yang tidak wajar. Pemberian kredit jangka pendek dengan pemberian pinjaman mulai dari Rp 20.000 sampai dengan Rp 200.000.000 jaminan berupa benda bergerak/ berupa barang perhiasan emas dan berlian, Elektronik, kendaraan maupun alat rumah tangga lainnya.

Dari setiap Masing-Masing Produk yang dikeluarkan Perum Pegadaian maksimal waktu kredit 4 bulan / 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar bunga dan biaya Administrasinya dengan persen yang telah ditentukan.

2. Sistem Pengambilan Keputusan Kredit Pada Perum Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru

Dalam prakteknya Perum Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru telah memakai prosedur 5 C yaitu:

a. Character

Keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal dapat terjamin dari latar belakang dan pekerjaan maupun dari segi keperibadian. Contohnya: Perum Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru, melihat dari latar belakang pekerjaan atau pendidikannya.

b. Capacity

Untuk melihat kemampuan berbisnisnya dihubungkan dengan latar pendidikannya. Memahami kemampuan berbisnis juga diukur dalam kemampuannya dalam memahami aturan pemerintah. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam melunasi kredit yang telah disalurkan.

c. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangannya (neraca dan laba rugi). Capital juga melihat dari mana saja sumber dana atau modal yang ada. Biasanya kredit yang disalurkan Perum Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru dengan jumlah yang besar (Rp.1000.000,- s/d 200.000.000,-).

d. Colleteral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang disalurkan dan melihat keabsahan barang jaminan jika ada

permasalahan maka barang jaminan dapat dipergunakan secepatnya (dijual) untuk menutupi uang pinjaman nasabah.

e. Condition

Perum Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru Dalam menyalurkan kredit juga melihat kondisi ekonomi dan politik. Dan pihak perum pegadaian juga melihat bagaimana prospek usahanya pada masa mendatang, dan barang jaminan yang sangat dibutuhkan oleh Perum Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru.

3. Contoh penghitungan kredit di Perum Pegadaian cabang Panam Pekanbaru

Pinjam Pokok pinjaman (PJ)

PJ= Jumlah Pinjaman

Jumlah pinjaman x Bunga

$$= 2.000.000 \times 1\%$$

$$= \text{Rp. } 20.000$$

Untuk menghitung pinjaman /15 hari adalah

BG = Bunga x Nominal Pinjaman

$$= 1,2\% \times 2.000.000$$

$$= \text{Rp. } 24.000,-$$

Administrasi

$$= 0,2\% \times 200.000$$

$$= \text{Rp. } 4000$$

$$= 24.000 + 4000 = \text{Rp. } 28.000,-$$

Keterangan

1. Untuk penghitungan pinjaman pokok

$$PJ = (\text{Pokok Pinjaman}) \times \text{Bunga}$$

2. Untuk menghitung pinjaman /15 hari adalah

$$BG = \text{Bunga} \times \text{Nominal Pinjaman}$$

3. Untuk menghitung biaya administrasi

$$BG = \text{Bunga} \times PJ = \text{pokok pinjaman}$$

Bunga telah ditetapkan perum pengadai berapa besar pinjaman yang disalurkan

4. Rumusan Masalah

Resiko yang di hadapi dalam pemberian kredit oleh pihak Perum Pegadaian cabang Panam Pekanbaru adalah tidak dilunasinya pada saat pelunasan. Apabila kredit tidak tertagih maka pihak Perum Pegadaian akan melakukan berbagai tindakan untuk meperkecil resiko tersebut.

Tindakan-tindakan yang dilakukan antara lain:

- a. Mengadakan pendekatan kepada pihak debitur, apabila debitur mempunyai kemampuan maka debitur akan memberikan keringanan berupa perpanjangan waktu pelunasan kredit.
- b. Apabila debitur tidak mampu membayar kredit maka dicari jalan keluar yang lebih baik, seperti menghapus secara keseluruhan kredit yang tidak terbayarkan pada periode yang bersangkutan.

Pencatatan Akuntansi pemberian kredit

Proses pencatatan Akuntansi sangat penting dalam penyaluran kredit yang dirancang untuk mencatat transaksi terjadinya aktivitas kredit, adapun catatan Akuntansi yang digunakan adalah:

- a. Jurnal pencairan/realisasi kredit
- b. Jurnal angsuran kredit (kredit pokok dan bunga)

- c. Jurnal pelunasan kredit

Fungsi-fungsi yang terkait dalam Akuntansi pemberian kredit adalah:

- a. Fungsi kredit bertugas dan bertanggung jawab untuk meneliti status kredit yang telah diberikan kepada debitur.
- b. Fungsi penagihan bertugas dan bertanggung jawab untuk membuat surat atau bukti pembayaran setoran atau tagihan secara periodic dari debitur.
- c. Fungsi Akuntansi bertugas dalam tanggung jawab untuk mencatat berkurangnya kewajiban debitur dan membukukan jumlahnya.

3.3.Langkah-langkah Perum Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru dalam Penanganan Kredit Macet atau Bermasalah

Pada umum setiap perbankan mengalami kredit macet atau bermasalah yang menyebabkan debitur tidak mampu untuk membayar kreditnya dalam arti tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Langkah-langkah yang diambil Perum Pegadaian cabang Panam pekanbaru dalam penanganan kredit bermasalah.

1. Melakukan pendekatan kepada debitur agar dapat menyelesaikannya tunggakanya dan pihak juga mengirim surat teguran pertama sampai surat teguran ketiga.
2. Nasabah yang tepat waktu dalam pengembalian kredit dikenakan denda sesuai dengan bunga pinjaman yang telah ditetapkan pegadaian.

3. Memberikan keringanan dengan cara memperpanjang waktu dengan syarat membayar administrasi dan denda selama memakai modal pinjaman.
4. Jika pendekatan tidak ditanggapi maka barang yang menjadi jaminan menjadi hak pegadaian.

BAB VI

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang penulis kemukakan diatas dapat disimpulkan:

1. Pegadaian adalah Satu-satunya Lembaga Keuangan selain Bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan cara hukum gadai, Hukum gadai pada usaha ini adalah kewajiban nasabah / calon peminjam untuk menyerahkan harta sebagai agunan kepada kantor Pegadaian disertai dengan pemberian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang) dalam kondisi yang sudah disepakati, di tentukan.
2. Pada dasarnya Barang jaminan sangat dibutuhkan dalam perum pengadaian, untuk melindungi uang yang disalurkan lewat kredit maka barang jaminan yang menjadi antisipasi terjadinya resiko.
3. Dalam penyaluran kredit perum pegadaian tidak jauh berbeda dengan perbankan. pegadaian juga memakai metode 5C yaitu :
 - a. Penilaian terhadap *character* (watak)
 - b. *Capacity* (Kemampuan)
 - c. *Capital* (Modal)
 - d. *Colleteral* (Agunan)
 - e. *Condition* (Kondisi Ekonomi)

4.2. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam menyalurkan kredit perum pegadaian cabang panam pekanbaru harus melihat keaslian barang atau keabsahan barang jaminan.
2. Penyimpanan barang jaminan sebaiknya perum pegadaian cabang panam pekanbaru lebih memperhatikan dan dijaga semestinya.
3. Sebaiknya perum pegadaian cabang panam pekanbaru Melakukan pendekatan kepada debitur agar dapat menyelesaikannya kredit tepat waktu dan pihak pegadaian juga mengirim surat lebih awal sebelum sampai waktu perlelangan barang jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Depertemen Agama RI. 2004, *Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta:CV. Pundi Aksara
- Dimiyati, Khutzafah dan Kelik Wardoino, 2004, *Metode Laporan Hukum*, Buku Pegangan Kuliah. FH UMS. Surakarta
- Fakultas Hukum Undip, 2005, *Hukum Jaminan, Edisi Revisi denagan UUHT*, Fakultas
- Hosen M Nadrattuzaman dan Ali Hasan, 2008, *Khutbah Jum'at Ekonomi Syari'ah*, PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syati'ah)
- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek*, Prenada Media, Jakarta
- Kasmir, SE.MM. 2008, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Majalah Info Bank "*Analisis Strategi Perbankan dan Keuangan Sayri'ah*", Web Ddesign by Ari Agung Nugraha-ULGS Sei Panas Batam
- Mariam Darus Badruzaman, 2003, *Bab-Bab Tentang Credietvervand, Gadai dan Fidusia* Alummi, Bandung
- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
- Peraturan Pemerintah Nomor. 103 tahun 2000 tentang (PERUM) Pegadain
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2003, *Hukum Jamian*, Fakultas Hukum Undip
- Ronny Hanitiyo Soemitra, 2004, *MPN dan juri Mentri*, Jakarta, Ghali
- Situs BUMN-Online*, 2005
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2000, *Pokok Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta

Sutan Remi Sjahdeini, 2002, *Hukum Kapailitan Memahami Fasiliissements-Verordening*, Pustaka Grafiti Jakarta

Tiong, Oey Hoey, 2000, *Fiducia sebagai Jaminan Unsu-Unsur Perkatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta [www. Pegadain.co.id](http://www.Pegadain.co.id)